

## **FUNGSI DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh)**

**Rapi Julian, S.A.P<sup>1</sup>, Effendi, S.Sos.,M.Si<sup>2</sup>, Awal Khairi, S.Sos.,M.A.P<sup>3</sup>**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

[Rapijulian96@gmail.com](mailto:Rapijulian96@gmail.com)

[effendi@gmail.com](mailto:effendi@gmail.com)

[awalkhairi@gmail.com](mailto:awalkhairi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

**Rapi Julian. NPM. 1610078201077.** *Title of Thesis Function of DPRD in Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City).*

*In carrying out its function as people's representatives, the Regional People's Representative Council has a function in the process of making public policies to increase knowledge of government in society. In addition, public policies can make people more fully participate in a government system. This function has been adjusted to the understanding of democracy and people's sovereignty where the people must carry out their duties as government participants in Sungai Penuh City. The formulation of the research problem is, What is the Function of the DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City)? The research objective is to determine the function of DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City). This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interview guides to 5 informants referring to 5 research indicators, namely 1. Agenda setting process 2. Policy formulation process 3. Policy adoption process 4. Policy implementation process and 5. Policy evaluation process. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informants' answers which were described in the results and discussion of the research which was then carried out by the interpreter of the researcher. It is known that the function of DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City) of the five research indicators four indicators are well implemented, namely for the indicators of the policy formulation process, the policy adoption process, the policy implementation process, and the policy evaluation process while the process indicators The formulation of policies has not been carried out properly and this is in line with the theory of Purwo's opinion which the author makes as a proposal in research indicators. For this reason, the authors suggest that the function of DPRD in the Public Policy Making Process in Sungai Penuh City can be improved so that it can be maximized in carrying out its function in policy making.*

**Keywords:** *DPRD Function, Public Policy Making Process*

### **ABSTRAK**

**Rapi Julian. NPM. 1610078201077** Judul Skripsi Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat meningkatkan pengetahuan pemerintahan di masyarakat. Selain itu kebijakan publik dapat membuat masyarakat lebih

maksimal dalam berpartisipasi di dalam sebuah sistem pemerintahan. Fungsi ini telah disesuaikan dengan paham demokrasi maupun kedaulatan rakyat dimana rakyat harus menjalankan tugas sebagai partisipan pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh)? Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui pedoman wawancara dilapangan kepada 5 orang informan yang mengacu kepada 5 indikator penelitian yaitu 1. Proses penyusunan agenda 2. Proses formulasi kebijakan 3. Proses adopsi kebijakan 4. Proses implementasi kebijakan dan 5. Proses evaluasi kebijakan. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. Diketahui bahwa Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh) dari lima indikator penelitian empat indikator yang terlaksana dengan baik yaitu untuk indikator Proses formulasi kebijakan, Proses adopsi kebijakan, Proses implementasi kebijakan, dan Proses evaluasi kebijakan sedangkan untuk indikator proses penyusunan kebijakan belum terlaksana dengan baik dan ini sejalan dengan teori pendapat Purwo yang penulis jadikan ajuan dalam indikator penelitian. Untuk itu penulis menyarankan agar Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Kota Sungai Penuh, dapat ditingkatkan agar lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya dalam penyusunan kebijakan.

**Kata Kunci : Fungsi DPRD, Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu didalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, rakyat menginginkan adanya penyelenggaraan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil. Dengan demikian, para penyelenggara Negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi baru dalam bidang pemerintahan secara keseluruhan. Dan sudah waktunya untuk difikirkan bagi kepentingan pemerintahan masa depan sebuah pola interaksi antara eksekutif dengan legislatif didaerah dengan menciptakan mekanisme "*Cheeks and Balances*" di tingkat lokal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut akan merubah peta pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia termasuk perubahan terhadap pengawasan daerah yang akan berimplikasi pada perubahan pengawasan terhadap anggaran daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi luas kepada Daerah membawa konsekuensi diperlukannya penyesuaian tata kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan di daerah. Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 42 Ayat (1) butir c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah”.

Substansi sasaran pokok yang hendak dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah adalah :

1. Pembangunan sistem dan kehidupan pemerintahan yang demokratis.
2. Penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dengan nuansa desentralisasi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Penegakan supremasi hukum Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.

Adanya perubahan sistem daerah sangat ditentukan oleh adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terlepas apakah kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk sekelompok atau golongan tertentu yang pasti dengan adanya kebijakan akan memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah fungsi DPRD dituntut untuk dapat membuat kebijakan publik bersama pemerintah yang berwenang agar kebijakan tersebut dapat dimplementasikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat

Kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di daerah umumnya ditentukan oleh anggota organisasinya, demikian halnya dilingkungan daerah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menentukan nasib dari kehidupan masyarakat banyak dan DPRD mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga perlu diawasi agar adanya kebijakan publik yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Namun perlu diketahui pula, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD pasti melalui hambatan-hambatan yang sedikit banyak mengganggu jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Hambatan ini merupakan permasalahan awal atau fenomena secara internal maupun eksternal, contohnya secara internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan secara eksternal terbatasnya waktu yang ada dalam proses pembahasan kebijakan.

Dalam sebuah pemerintahan peran dan fungsi kebijakan publik menjadi leading sector program pembangunan nasional, maka setiap output dari proses pemerintahan yang dilaksanakan oleh para elit pemerintahan yang tergabung dalam lembaga eksekutif dan legislatif.

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kebijakan atau regulasi yang dihasilkan belum berorientasi kepada publik. Kasus-kasus yang terjadi pada pemerintahan adalah sebuah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Sistem pemerintahan merupakan suatu siklus yang mengintegrasikan para pelaku pemerintahan dalam menyerap aspirasi pemerintahan di masyarakat menjadi sebuah regulasi melalui dalam masyarakat seperti pengangkatan CPNS,

kepala lembaga dan instansi hal tersebut dikarena adanya peran kebijakan publik dalam pembentukan kebijakan pemerintahan, dimana masih perlu adanya integrasi persepsi dalam membuat kebijakan antara para pelaku pemerintahan yang berada dalam unsur Kebijakan Publik dalam pembentukan kebijakan di daerah.

Timbulnya kebijakan yang dipandang tidak adil oleh beberapa masyarakat yang berkepentingan, hendaknya diketahui dan dijadikan aspirasi oleh para unsur Kebijakan Publik sebagai upaya perbaikan kebijakan selanjutnya, namun demikian halnya seperti Partai pemerintahan, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Media Sosial dan Tokoh Masyarakat, saat ini seolah tidak berada dalam garis integritas pada sebuah sistem pemerintahan yang baik. Kondisi ini terlihat dari perilaku masing-masing unsur Kebijakan Publik itu sendiri, dimana partai pemerintahan sibuk memperluas jaringan kekuasaan masing-masing partai sehingga terkadang timbul konflik baik dalam internal partai itu sendiri maupun dengan partai yang lainnya.

Kelompok kepentingan terkadang dijadikan alat pemerintahan sehingga mereka tidak lagi memahami peran dan fungsinya dalam pembentukan sebuah kebijakan publik pada sistem pemerintahan yang di jalankan saat ini, kelompok penekan sibuk dengan membuka kelemahan-kelemahan pemerintahan yang sedang berdiri yang di afiliasikan melalui media masa. Tokoh pemerintahan yang seharusnya menjadi sentral stabilisator bangsa, terkadang terjebak dengan situasi pemerintahan kepentingan yang berdampak kepada timbulnya kelompok-kelompok masyarakat. Kondisi ini cukup memprihatinkan apabila terus berjalan, di satu sisi para elit pemerintahan sibuk untuk mendapatkan kekuasaan, di sisi lain masyarakat menunggu keberpihakan pemerintah atas harapan-harapannya.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 8) mengatakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

## III. HASIL PENELITIAN

### A. Defenisi Operasional variabel

Menurut Purwo, (2012:39) yaitu ada 5 proses dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:

#### 1. Proses Penyusunan Agenda

proses masuknya agenda- agenda kepada DPRD yang harus segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya sehingga menghasilkan suatu kebijakan publik. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Proses Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### **3. Proses Adopsi Kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

### **4. Proses Implementasi Kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

### **5. Proses Evaluasi Kebijakan**

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## **IV. SIMPULAN**

### **1. agenda Proses penyusunan kebijakan**

A. Dalam prosedur penyusunan agenda, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kota Sungai Penuh menerima laporan permasalahan yang masuk kemudian diagendakan, setelah itu dilihat mana yang permasalahan yang harus mendapat prioritas untuk segera disidangkan.

B. fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan agenda kebijakan belum dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya dikarenakan banyaknya persoalan yang mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

C. Hasil dari proses penyusunan agenda akan menjadi tugas bagi DPRD untuk dapat menjalankan fungsinya dalam membuat suatu kebijakan publik

### **2. Proses formulasi kebijakan**

A. Dalam prosedur formulasi kebijakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh melakukan pemilahan mana permasalahan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya dan membuat suatu kebijakan

B. fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses formulasi kebijakan publik sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada sehingga masalah-masalah yang muncul dapat ditanggulangi dengan baik dan dapat dicarikan solusinya.

C. Hasil dari proses formulasi kebijakan akan menjadi suatu tumpukan permasalahan-permasalahan yang ditampung oleh DPRD Kota Sungai Penuh itulah yang dijadikan bahan untuk menentukan mana permasalahan yang harus didahulukan dicarikan solusinya dalam membuat kebijakan



### 3. Proses adopsi kebijakan

- A. Prosedur adopsi kebijakan merupakan proses dimana kebijakan yang akan dibuat dapat diadopsi dari usulan anggota atau pihak tertentu yang disepakati dan disetujui secara bersama dalam suatu sidang sehingga dapat menjadi suatu kebijakan.
- B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses adopsi kebijakan publik sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dimana bisa saja rumusan kebijakan yang ditawarkan diadopsi dan didukung oleh legislatif lembaga serta putusan pengadilan dan akhirnya akan menghasilkan suatu kebijakan publik.
- C. Hasil dari proses adopsi kebijakan akan menjadi suatu kebijakan publik apabila disepakati dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang

### 4. Proses implementasi kebijakan

- A. Prosedur implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang sudah disetujui dan disahkan kemudian diimplementasikan kepada masyarakat.
- B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses implementasi kebijakan publik sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dimana kebijakan tersebut harus dapat diterapkan apalagi kebijakan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat di Kota Sungai Penuh.
- C. Hasil dari proses implementasi kebijakan merupakan kebijakan baru yang sudah disahkan yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut tidak hanya sekedar wacana saja

### 5. Proses evaluasi kebijakan

- A. Prosedur evaluasi kebijakan merupakan suatu proses dimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan kemudian dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut meraih apa yang diharapkan.
- B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses evaluasi kebijakan publik sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dimana proses evaluasi penting dilakukan agar kebijakan yang sudah disahkan betul-betul memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.
- C. Hasil dari evaluasi kebijakan merupakan tolok ukur bagi DPRD Kota Sungai Penuh untuk dapat melihat sejauhmana kebijakan tersebut berdampak positif kepada masyarakat.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW , *rahmatan lil alamin*

Berkat taufik dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi kasus di Kota Sungai Penuh)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA - NUSA) Sungai Penuh pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 2009. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Bugin, B 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadillah. 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.
- Flippo. 2004. *Efektifitas Kerja*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- G.R. Terry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV.Andi Karya Yogyakarta
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Harold Koontz and Weihrich, Heinz. 2006. *Human Resources Management*, McGraw-Hill Irwin.
- Miriam B. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Purwo, Palan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Umar. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit BPFE – UGM
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Soekidjo Notoatmodjo. 2002. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Ranika
- Wahyudi Iskandar dkk. 2017. *Implemtasi fungsi pengawsan DPRD dalam Kebijakan Pemerintahan Daerah di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmiah
- Widodo. 2001. *Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang*. Jakarta. PT. Rajawali Pers.
- UU Negara RI 1945 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Negara
- UU No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh
- UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang DPRD
- UU.No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah